

PELEMBAGAAN PARTAI GERINDRA DALAM PILKADA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

INSTITUTION OF THE GERINDRA PARTY IN THE 2020 SOUTH COAST DISTRICT ELECTIONS

Debby Artha Sevindo¹, Asrinaldi², Andri Rusta³
^{1,2,3}Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas
arusta@soc.unand.ac.id

ABSTRAK : Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal. Pelembagaan menurut Vicky Randall dan Lars Svasand sebagai sebuah proses pematangan partai politik dalam aspek struktural dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana pelembagaan Partai Gerindra dalam kesuksesan memenangkan Pilkada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori pelembagaan menurut Vicky Randall dan Lars Svasand. Hasil penelitian ini adalah Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan semua fungsi dan kewajibannya sesuai dengan AD/ART, dalam hal pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, hubungan dengan pihak luar, serta cara partai menempatkan diri di tengah masyarakat, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kemenangan yang diraih oleh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan pada saat Pilkada 2020 melalui pelembagaan partai politik yang baik. Terlepas dari keuntungan kompetitif dengan membawa nama Prabowo Subianto, Partai Gerindra berhasil hadir di tengah masyarakat sebagai partai yang mengedepankan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui kader-kader partai yang terpilih dan duduk di kursi pemerintahan.

Kata kunci: Partai Politik; Partai Gerindra; Pelembagaan Partai Politik

ABSTRACT : A political party is a group of people who are organized in a stable manner with the aim of seizing or maintaining power over the government for the leadership of their party, and based on this control provide their party members with ideal benefits. Institutionalization according to Vicky Randall and Lars Svasand as a process of stabilizing political parties in structural and cultural aspects. This study aims to describe and explain the Gerindra Party as a political force in its success in winning the 2020 Pilkada for the District Head of Pesisir Selatan Regency. The method used is a qualitative method with case studies. This study uses the theory of institutionalization according to Vicky Randall and Lars Svasand. The results of this study are that the Gerindra Party in Pesisir Selatan district has carried out all its functions and obligations in accordance with the AD/ART, in terms of decision-making, leadership style, relations with outsiders, and the way the party positions itself in society, so the researcher concludes that the victory achieved by the Gerindra Party in Pesisir Selatan Regency during the 2020 Pilkada through the institutionalization of good political parties. Apart from the competitive advantage of carrying the name Prabowo Subianto, the Gerindra Party has succeeded in being present in society as a party that prioritizes and prioritizes people's welfare through party cadres who are elected and sit in government seats.

Keywords ; Political Parties; Gerindra Party; Institutionalization of Political Parties

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan oleh negara yang demokrasi dalam menentukan pemimpin baik di pusat maupun daerah. Pemilihan umum juga bisa dikatakan sebagai salah satu sarana penyampaian aspirasi masyarakat dalam memberikan hak pilih dan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan menentukan siapa pemimpin yang pantas untuk mereka perjuangkan. Pemilihan umum pertama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pada tahun 1955 dan sering disebut juga sebagai Pemilu yang paling demokratis meski pelaksanaannya saat situasi negara belum kondusif.

Dalam konteksnya, Pemilu merupakan ajang pertunjukan bagi partai-partai yang mengikuti Pemilu baik itu untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilu Lembaga Legislatif maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) untuk menunjukkan seberapa kuat pengaruh dan popularitas partai yang telah dibangun ditengah masyarakat. Partai yang memiliki popularitas serta memiliki kekuatan dan kekuasaan politik yang kuat, memiliki kesempatan besar untuk memenangkan pertarungan tersebut. Banyak hal yang dilakukan oleh partai politik untuk mendapat kemenangan dalam ajang tersebut. Berbagai macam cara dilakukan seperti membangun koalisi dengan partai lain dan mencari relasi sebanyak mungkin supaya bisa memperoleh dukungan seperti apa yang telah direncanakan.

Partai politik merupakan organisasi politik yang dijalankan atas dasar ideologi tertentu yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Partai politik erat hubungannya dengan aktivitas pemerintahan di suatu negara. Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia, maka negara menjamin kebebasan bagi warga negaranya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Partisipasi yang dimaksud adalah baik berupa penyampaian aspirasi maupun pembentukan partai politik. Sehingga pada masa Indonesia saat ini, muncul beberapa partai politik baru sebagai bentuk upaya partisipasi dari warga negara. Partai politik baru tentunya menyajikan persaingan yang semakin ketat dalam dunia perpolitikan Indonesia.

Sistem multipartai telah memberikan ruang luas bagi perkembangan partai politik di Indonesia. Mulai dari partai Islam, nasionalis, juga ada partai yang memadukan antara Islam atau religius dan nasionalis. Partai-partai ini begitu antusias mengikuti pemilu pertama era reformasi tahun 1999. Tercatat pada masa tersebut berdiri 181 partai politik, namun hanya 141 partai yang disahkan. Dari 141 partai yang sah, terdapat 60 partai yang lolos verifikasi, dan setelah divalidasi oleh pihak berwenang, hanya 48 partai politik yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 1999. Sejak itulah partai politik memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia.

Melalui partai-partai politik itulah cabang-cabang trias politica kemudian diisi yakni anggota parlemen, presiden dan wakil presiden, pemerintah daerah hingga kabinet. Tidak ada satupun wilayah politik yang luput dari keterlibatan partai politik di dalamnya. Maka, tidak berlebihan jika Firman Noor mengatakan bahwa saat ini partai politik telah demikian omnipotent dan omnipresent. Hal ini berarti partai politik memiliki peran di banyak tempat.

Partai politik yang di dalamnya memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi khalayak banyak untuk berempati kepada mereka. Hal itu dilakukan supaya apa yang ingin diraih dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mencapai hal tersebut baik calon kepala daerah maupun partai politik akan menimbulkan persaingan yang sangat ketat. Hal itu membuat mereka saling beradu taktik dan strategi yang dapat membuat mereka meraih kemenangan yang mereka inginkan. Menurut Giovanni Sartori, seorang ahli ilmu politik mengurai bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti Pemilu, dan melalui Pemilu itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Agar memperoleh eksistensi dalam sistem politik, aktor politik harus bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kekuasaan.

Kekuatan politik kelompok sosial budaya yang mencoba memengaruhi proses pembuatan dan perumusan keputusan politik dengan sumber power yang dimiliki. Suatu kelompok akan memengaruhi

keputusan-keputusan politik, apabila keputusan atau kebijakan yang dibuat menyangkut kepentingan (interest) mereka, sehingga apapun konsekuensinya akan dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut dengan berbagai upaya. Upaya-upaya yang dilakukan biasanya dengan mengerahkan segala sumber kekuatan (*power*) yang dimiliki dan melalui saluran-saluran yang tersedia seperti yang dianggap paling efektif.

Pada dasarnya, banyak aspek potensial yang bisa menjadi kekuatan politik sebagaimana yang dikatakan oleh Menurut Bachtiar Effendy dikutip dari P. Antonius Sitepu yakni apakah kekuatan ini bersifat formal atau nonformal. Kekuatan-kekuatan ataupun kelompok-kelompok yang sejenis dengan itu. Kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk ke dalam partai-partai politik. Sementara yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik yang bersifat nonformal, adalah merupakan bagian dari bangunan *civil society*.

Menurut Carl J. Friedrich bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal. Sedangkan menurut R.H Soltau bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum.

Sebuah partai politik agar tetap bertahan dalam persaingan politik kontemporer haruslah memiliki tingkat pelembagaan partai yang baik, karena dengan pelembagaan ini partai memiliki orientasi hasil jangka panjang. Akan tetapi untuk mencapai tingkat pelembagaan yang baik bukanlah hal yang mudah dan masih menjadi tantangan yang sulit bagi partai-partai politik di Indonesia. Sebab, fenomena menunjukkan bahwa partai politik saat ini lebih berfokus dalam membangun strategi politik jangka pendek demi mencapai kemenangan saat Pemilu, ketimbang berfokus memperbaiki kualitas pelembagaan partai.

Partai Gerindra merupakan sebuah partai politik yang beridiri pada awal tahun 2008 yang berdekatan dengan pelaksanaan waktu pendaftaran dan masa kampanye pada Pemilu 2009, yakni pada tanggal 6 Februari 2008. Berdirinya Partai Gerindra tidak bisa dilepaskan dari Partai Indonesia Raya (Parindra) bentukan kakek Prabowo, R.M. Margono Djojohadikusumo bersama Dr. Soetomo dan Mohammad Husni Thamrin atas saran dari Sukarno sebelum diasingkan ke Ende pada tahun 1933.

Berikut hasil Pilkada yang diikuti oleh Partai Gerindra pada tahun 2009, 2014, dan 2020 :**Tabel 1. Perolehan Suara Partai Gerindra dan Koalisi dalam Pilkada 2010, 2015, dan 2020**

Tahun	Perolehan Suara
2010	66.302 suara
2015	91.304 suara
2020	128.922 suara

Sumber : Data KPU Pesisir Selatan

Dari data tabel 1.1 di atas, dapat dilihat peningkatan suara yang diperoleh oleh Partai Gerindra beserta partai koalisi yang bergabung di dalamnya, di mana pada awal mengikuti kontes Pilkada pada tahun 2010, Partai Gerindra yang baru berdiri berhasil memenangkan pasangan calon yang didukungnya dengan partai koalisi lainnya. Peningkatan suara terus terjadi pada tahun 2015 dan terakhir pada Pilkada 2020 yang berhasil memenangkan pasangan calon yang merupakan kader serta Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dengan perolehan 128.922 suara, walaupun pada saat itu calon dari kader Partai Gerindra tersebut yakni Rusma Yul Anwar pernah terlibat kasus hukum.

Berbicara mengenai pelembagaan partai politik terdapat dua ahli yang berfokus membahas pelembagaan partai politik, yakni Vicky Randall dan Lars Svasand. Kedua orang ahli ini berusaha melihat pelembagaan partai politik dari dua aspek, pertama yaitu aspek internal-eksternal dan kedua aspek struktural-kultural. Persilangan kedua aspek ini nantinya memunculkan empat dimensi yang bisa digunakan sebagai indikator untuk membantu melihat bagaimana pelembagaan sebuah partai politik. Keempat dimensi hasil persilangan kedua aspek pelembagaan tersebut adalah *systemness*, *decisional autonomy*, *value infusion*, dan *reification* (derajat kesisteman, otonomi pengambilan keputusan, derajat identitas nilai, dan reifikasi).

Indikator-indikator pelebagaan partai politik hasil pemikiran Vicky Randall dan Lars Svasand inilah yang nantinya akan membantu peneliti dalam melihat seperti apa pelebagaan yang dimiliki Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pilkada 2020 yang menjadi kekuatan politik dalam kemenangan Rusma Yul Anwar-Rudy Hariyansyah. Penelitian ini menjadi menarik diteliti karena fokus dari penelitian ini adalah melihat apakah pelebagaan dalam tubuh organisasi Partai Gerindra sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Penelitian yang membahas tentang Partai Politik sebagai kekuatan politik sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain, setidaknya dalam catatan peneliti ada lima penelitian terkait dengan kekuatan politik diantaranya, Nurlatipah Nasir, Muhammad Ridha T.R, Audrah Yessy Akbar, Biwa Okta Brando, dan Okadarmi Dwi Kaypama.

Penelitian ini menjadi baru untuk dilakukan karena kemenangan yang didapatkan oleh pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra yakni Rusma Yul Anwar-Rudy Hariyansyah merupakan dampak atau efek dari pelebagaan partai baik itu secara internal maupun eksternal yang baik dari Partai Gerindra itu sendiri, karena sudah banyak penelitian yang membahas kemenangan partai politik dilihat dari faktor strategi politik, ataupun peran tokoh-tokoh politik yang terlibat dalam partai tersebut. Sedangkan penelitian ini akan melihat lebih dalam pelebagaan dari Partai Gerindra yang kemudian menjadi kekuatan politik bagi Partai Gerindra itu sendiri.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena pada saat Pilkada 2020 berlangsung, pasangan calon Rusma Yul Anwar-Rudy Hariyansyah yang diusung oleh Partai Gerindra beserta partai koalisi lainnya masih tersangkut kasus hukum yang melibatkan calon Bupati yaitu Rusma Yul Anwar, tetapi hasil yang didapatkan oleh Partai Gerindra beserta partai koalisi dan pasangan calon ini adalah kemenangan pada Pilkada 2020, sehingga peneliti akan melihat dan mendeskripsikan bagaimana kekuatan politik yang dimiliki oleh Partai Gerindra ini di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga bisa membawa kemenangan bagi calon yang diusungnya ditambah calon tersebut memiliki masalah hukum.

Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan yang tercatat sebagai salah satu partai pemenang dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan dan kekuasaan yang didapat oleh Partai Gerindra didapatkan berkat usaha dan faktor-faktor pendukung lainnya yang menjadikan Partai Gerindra menjadi salah satu kekuatan politik pada Pilkada 2020.

Kekuasaan dan kekuatan politik yang dimiliki oleh Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan, contohnya saja perolehan kursi di DPRD Pesisir Selatan dengan total 5 kursi yang sama dengan total kursi partai PAN sebagai partai pendukung paslon ini. Pemerataan kekuasaan yang dimiliki Partai Gerindra membuat presentase kemenangan dari paslon ini besar. Koalisi dari partai pengusung dari paslon 02 ini memiliki perolehan kursi dengan total 14 kursi di DPRD Pesisir Selatan.

Tabel 2. Partai Koalisi dan Perolehan Kursi Pilkada 2020

No.	Partai Politik	Kursi
1.	Gerindra	5
2.	PAN	5
3.	PBB	2
4.	Perindo	1
5.	Berkarya	1

Sumber : Website KPU Pesisir Selatan

Kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh Partai Gerindra membuat Partai Gerindra mudah untuk melakukan gerakan-gerakan politik yang di mana tujuan dari gerakan politik tersebut untuk mencari suara dan dukungan yang dapat memenangkan paslon Rusma Yul Anwar dan Rudy Hariyansyah untuk dapat memenangkan Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 3. Pasangan Calon, Suara, dan Partai Pengusung Pilkada 2010 Pesisir Selatan

Pasangan Calon	Jumlah Suara	Partai Pengusung
Nasrul Abit-Editiawarman	66.302	Demokrat, PAN, PKS, Gerindra
Bakri Bakar-Risnaldi	57.234	Hanura, PPD, PNBKI, PBB
Syafrizal Dt. Nanbatuah-Saidal Masfiyudin	55.539	Golkar,

Hasdanil-Mukhrizal	11.587	PPP
Akmal Nesal-Marlina Amri	7.770	PKBP, PPPI, BARNAS, PKPI, PKB, PDP, PKP, PMB, PDK, PRN, Pelopor, Patriot, Merdeka

Sumber : Data KPU Pesisir Selatan 2010

Pada tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa pasangan calon yang didukung Partai Gerindra beserta partai pendukung lainnya mendapatkan kemenangan pada saat Pilkada 2010 Kabupaten Pesisir Selatan yang dimana pada saat itu Partai Gerindra merupakan partai yang baru didirikan dan masih tergolong partai yang sangat baru.

Tabel 4. Pasangan Calon, Suara, dan Partai Pengusung Pilkada 2015 Pesisir Selatan

Pasangan Calon	Jumlah Suara	Partai Pengusung
Hendrajoni-Rusma Yul Anwar	91.304	PAN, Nasdem, Gerindra
Editawarman-Bakri Bakar	59.344	Hanura, PDI-P, PBB, PKB
Burhanuddin-Novil Anas	12.916	Demokrat, PPP
Alirman Sori Raswin	31.886	PKS, Golkar

Sumber : Data KPU Pesisir Selatan 2015

Pada tabel 1.4, dapat dilihat juga bahwa pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan partai pendukung lainnya kembali meraih kemenangan dengan perolehan suara yang cukup menjanjikan, perkembangan yang dialami oleh Partai Gerindra yang berawal dari partai baru lahir menunjukkan kematangannya untuk bisa menjadi salah satu partai berkuasa di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 5. Pasangan Calon, Suara, dan Partai Pengusung Pilkada 2020 Pesisir Selatan

Pasangan Calon	Jumlah Suara	Partai Pengusung
Hendrajoni-Hamdanus	86.074	Nasdem, PKS, Demokrat
Rusma Yul Anwar-Rudy Hariyansyah	128.922	Gerindra, PAN, PBB, Perindo, Berkarya
Dedi Harmanto Putra-Arfianof Rajab	10.220	Golkar, PDI-P, PKB, PPP, Hanura

Sumber : Data KPU Pesisir Selatan 2020

Puncaknya pada saat perhelatan Pilkada 2020 Kabupaten Pesisir Selatan, pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan partai pendukung lainnya di mana Calon Bupati adalah kader terbaik dari Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan, yang pada saat itu calon tersebut pernah tersangkut kasus hukum yang hampir membawa dirinya masuk ke dalam penjara, tetapi hasil akhir dari perhelatan tersebut adalah kemenangan mutlak yang didapatkan oleh pasangan calon tersebut.

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap pasangan calon yang diusung dan didukung oleh Partai Gerindra selalu meraih kemenangan dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan. Hal itu membuktikan bahwa Partai Gerindra berhasil membangun dan mempertahankan kekuasaan serta kekuatan politiknya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Terlihat jelas bagaimana dominasi Partai Gerindra walaupun didukung oleh partai koalisi lainnya, tetapi peneliti melihat bagaimana pelembagaan yang dimiliki oleh Partai Gerindra dalam Pilkada 2020 Kabupaten Pesisir Selatan yang pada saat itu kader Partai Gerindra yakni Rusma Yul Anwar ditunjuk untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pernah terlibat kasus hukum yang hampir membawa dirinya masuk penjara.

Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian mengenai Pelembagaan Partai Gerindra dalam Pilkada 2020 yang mengusung pasangan calon Rusma Yul Anwar-Rudy Hariyansyah, terlepas dari koalisi bersama dengan partai lain, peneliti akan melihat seperti apa Partai Gerindra dalam memperkuat dukungan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk memenangkan pasangan calon 02 ini dengan mengkaji kekuatan politik Partai Gerindra.

Kemerataan kekuasaan yang dimiliki oleh Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan terlihat dengan perolehan suara yang diraih oleh kader terpilih pada Pileg 2019, di mana pada dapil 1 kader Partai Gerindra Aprinal Tanjung meraih 1.451 suara, pada dapil 2 Pardinal meraih 1.028 suara,

pada dapil 3 Herpi Damson meraih 2.320 suara, pada dapil 4 Harianto meraih 2.008 suara, dan pada dapil 5 Hakimin meraih 2.682 suara.¹

Tabel 6. Perolehan Suara Kader Partai Gerindra di Pileg 2019

Nama Kader	Suara	Dapil
Aprinal Tanjung	1.451	1
Pardinal	1.028	2
Herpi Damson	2.320	3
Harianto	2.008	4
Hakimin	2.682	5

Sumber : Data KPU Pesisir Selatan 2019

Data di atas mendeskripsikan tentang kader Partai Gerindra yang mewakili partai tersebut di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, yakni menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi tempat penampungan aspirasi masyarakat disetiap lokasi dapil yang dikuasi oleh kader Partai Gerindra.

Kemenangan yang diraih oleh pasangan ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena ini. Di mana calon Bupati dari nomor urut 2 belum lepas dari masalah hukum tentang pengrusakan hutan lindung di kawasan hutan mandeh tarusan, pesisir selatan. Secara logikanya, jika seorang pejabat/elit politik yang tersandung masalah yang lumayan fatal seperti yang dialami oleh Rusma Yul Anwar ini, hal tersebut akan membuat kepercayaan dan rusaknya reputasi serta menurunnya kredibilitas dari calon tersebut dan tidak mungkin bisa memenangkan Pilkada serentak yang dia ikuti.

Pelebagaan partai yang telah dibangun oleh Partai Gerindra menjadikan partai ini menjadi salah satu partai penguasa di Kabupaten Pesisir Selatan. Kekuasaan tersebut meliputi Rusma Yul Anwar yang sebelum terpilih menjadi seorang Bupati menjabat sebagai Wakil Bupati yang pastinya memiliki pengaruh dalam sistem pemerintahan. Bukti kekuasaan Partai Gerindra selanjutnya yaitu memiliki lima kursi dalam roda pemerintahan pesisir selatan, meliputi Hakimin sebagai Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Herpi Damson sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra dan sebagai Anggota DPRD Pesisir Selatan, Pardinal Dt. Tankiamek sebagai Anggota DPRD Pesisir Selatan, Harianto sebagai Anggota DPRD Pesisir Selatan, dan Aprinal Tanjung sebagai Anggota DPRD Pesisir Selatan.

Tabel 7. Kader Partai Gerindra di DPRD Pesisir Selatan Tahun 2020

Nama Kader	Jabatan di DPRD Pesisir Selatan
Hakimin	Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan
Herpi Damson	Ketua Fraksi Partai Gerindra
Pardinal Dt. Tankiamek	Anggota DPRD Pesisir Selatan
Harianto	Anggota DPRD Pesisir Selatan
Aprinal Tanjung	Anggota DPRD Pesisir Selatan

Sumber : Website DPRD Pesisir Selatan

Dengan dukungan penuh dari masyarakat menjadikan pasangan calon ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara sah yang diumumkan langsung oleh KPU. Secara resmi KPU mengumumkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2, di mana pasangan nomor urut 2 berhasil mengungguli pasangan nomor urut 1 dan 3, dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 86.074 (38,22%), pasangan nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 128.922 (57,24%), sedangkan pasangan nomor urut 3 yang masih terbilang baru memperoleh suara sebanyak 10.220 (4,54%):

Tabel 8. Nama Pasangan Calon Bupati dan Perolehan Suara

No.	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Hendrajoni-Hamdanus	86.074 (38,22%)
2.	Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah	128.922 (57,24%)
3.	Dedi Harmanto putra-Arfianof Rajab	10.220 (4,54%)

¹ Pelantikan 45 Anggota DPRD Pessel Periode 2019-2024, dari situs Covesia.com diakses pada tanggal 24 Juli 2022

Sumber : website KPU Pesisir Selatan

Penelitian ini akan melihat bagaimana Pelembagaan Partai Gerindra yang memiliki pengaruh terhadap kemenangan pasangan Rusma Yul Anwar-Rudy Hariyansyah. Pelembagaan partai yang baik dilakukan oleh Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki dampak terhadap hasil yang diperoleh oleh pasangan ini karena mampu membawa pasangan calon ini memenangkan Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang pada saat itu masih terlibat kasus hukum yang belum selesai.

Seperti data yang peneliti jelaskan di atas, peneliti berasumsi bahwa dari setiap calon yang didukung oleh Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan dapat meraih kemenangan dikarenakan keberhasilan Partai Gerindra dalam membentuk pelembagaan partai baik itu secara internal maupun eksternal yang berdampak kepada kuatnya Partai Gerindra dan dominasi partai dalam Pilkada 2020. Asumsi penelitian yang peneliti bangun di sini adalah bahwa kemenangan Partai Gerindra pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan semakin bagusnya tingkat pelembagaan yang dimiliki Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan tersebut. Asumsi yang peneliti bangun ini didasarkan atas fakta-fakta yang peneliti temukan berkaitan dengan Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan. Itulah yang nantinya akan peneliti jadikan sebagai data awal dalam melihat lebih jauh pelembagaan yang dimiliki Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan.

Ini sangat menarik untuk diteliti bagaimana Pelembagaan Partai Gerindra dapat memenangkan Pilkada 2020 dengan selisih perolehan suara yang begitu jauh. Ini terlihat bagaimana pasangan yang didukung oleh partai tersebut dapat memenangkan dan menuntaskan pertarungan Pilkada Bupati Pesisir Selatan dengan hasil yang sangat memuaskan serta mengalahkan calon petahana yang berpotensi besar memenangkan Pilkada tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Jenis penelitian yang di teliti oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Data yang diperoleh tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan, atau memo dan dokumen resmi lainnya yang mendukung kepada penelitian peneliti.

Tipe penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus instrumental. Studi kasus instrumental merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan suatu isu atau perhatian. Oleh karena itu tipe ini cocok untuk mendeskripsikan kekuatan politik dari Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian studi kasus ini merupakan strategi yang lebih cocok apabila inti pertanyaan dari suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why* dan jika fokus penelitian ini terletak pada fenomena kontemporer dalam kehidupan yang nyata.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang peneliti dapat dari wawancara dengan informan akan peneliti sajikan dalam bab ini, data lapangan berupa wawancara dan dokumentasi akan peneliti jelaskan secara deskriptif sehingga peneliti dapat memberikan analisis data yang peneliti temukan di lapangan tersebut. Pada bab ini peneliti juga menganalisis berdasarkan tujuan peneliti yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis Partai Gerindra sebagai kekuatan politik dalam Pilkada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.

Menurut Huntington, pelembagaan partai politik dipahami sebagai situasi di mana organisasi partai politik telah memperoleh nilai dan stabilitas, dan situasi ini mencakup berbagai aspek proses perkembangan partai sejak awal. Institusionalisasi merupakan tujuan terpenting yang ingin dicapai oleh partai politik, dan tercapainya institusionalisasi berarti partai politik mencerminkan telah benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai organisasi. Selain itu, pelembagaan juga menjadi kunci utama bagi partai politik untuk bertahan dengan pesatnya perkembangan dan konflik politik yang ada. Partai politik yang telah mencapai pelembagaan biasanya memiliki akar yang kuat. Sebaliknya, partai

politik dengan sistem organisasi yang buruk cenderung mudah terguncang dan berumur pendek ketika dihadapkan pada berbagai krisis yang mengiringi perkembangan demokrasi.

Pilkada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 menjadi salah satu kontes yang sangat menarik untuk diteliti, karena Bupati terpilih yakni Rusma Yul Anwar masih berstatus sebagai tersangka sebelum dilaksanakannya Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan. Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung Rusma Yul Anwar untuk maju sebagai calon Bupati tidak mengurungkan niatnya untuk tetap melanjutkan proses pemenangan Rusma Yul Anwar hingga terpilih menjadi Bupati untuk Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam mendeskripsikan mengenai pelebagaan partai politik, di sini penulis tentu menggunakan teori sebagai pisau analisis utama dalam membedah dan menganalisis fakta yang ada di lapangan. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian teori pada bab sebelumnya peneliti memakai teori pelebagaan partai politik dari Randall & Svasand. Secara singkat pemahaman mengenai pelebagaan partai politik menurut Randall dan Svasand yakni proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam mempolakan perilaku, maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya. Randall & Svasand mengatakan dalam proses pelebagaan ini ada dua aspek utama yaitu, pertama aspek internal-eksternal, kedua aspek struktural-kultural. Kedua aspek ini menurutnya saling bertemu dalam persilangan sehingga menghasilkan aspek kesisteman. Aspek kesisteman yang dihasilkan menurut Randall & Svasand ini ada empat aspek atau biasa juga disebut dimensi yaitu *Systemness*, *Value Infusion*, *Decisional Autonomy*, dan *Reification*. Dalam mendeskripsikan pelebagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Pileg Kota Padang Tahun 2019 peneliti menggunakan ke-empat dimensi di atas sebagai indikator dalam melihat pelebagaan Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Kesisteman Organisasi (*Systemness*)

Dalam dimensi kesisteman ini, pelebagaan pada dasarnya merujuk pada bagaimana pengelolaan alat-alat kelengkapan partai atau infrastruktur yang ada, pengelolaan tersebut berkaitan dengan proses pelaksanaan fungsi-fungsi yang ada dalam sebuah partai politik beserta ketetapan yang telah disepakati sebelumnya oleh partai politik tersebut.

Bisa dikatakan bahwa dimensi dari kesisteman ini mengacu kepada proses pengelolaan partai dari segi internal, apakah haluan pergerakan partai dalam melaksanakan fungsi-fungsinya berpegang pada AD/ART atau tidak. Sebuah partai politik dikatakan telah melembaga dari aspek kesisteman apabila partai tersebut melaksanakan fungsinya menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci.

Melihat dari indikator kesisteman ini, sebuah organisasi yang terlembaga menurut Randall & Svasand memiliki sistem kaderisasi dan pola rekrutmen yang jelas dan dijalankan sesuai aturan yang telah disepakati, yakni AD/ART. Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini, peneliti menanyakan mengenai Bagaimana kesisteman pelebagaan yang dilakukan oleh Partai Gerindra, apakah sudah sesuai dengan AD/ART atau tidak kepada Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan yakni Herpi Damson, berikut pernyataannya :

“.....Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabuapten Pesisir Selatan, sistem kelembagaannya sudah merujuk kepada AD/ART Partai yang diatur di dalam BAB V tentang anggota dan kader pasal 14 dan pasal 15, yang mana anggota Partai Gerindra adalah Negara Republik Indonesia yang setia kepada pancasila, UUD 1945 dan NKRI yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota partai dan kader Partai Gerindra adalah anggota Partai Gerindra yang merupakan tenaga inti (pengurus), dan penggerak partai (sayap-sayap partai), dan juga pembentuk kader Gerindra dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan kader secara berjenjang atau terstruktur. Jadi pada intinya dapat disimpulkan bahwa kesisteman pelebagaan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan sudah sesuai dengan AD/ART....”

Berdasarkan pernyataan informan di atas terlihat bahwa Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan mengenai kesisteman pelebagaan partainya sudah sesuai dengan AD/ART. Dapat dilihat juga bahwa dalam pemilihan kader ataupun anggota baru yang ingin bergabung dengan Partai Gerindra, selain harus memiliki keinginan dan kesukarelaan dari anggota tersebut, calon anggota akan dilatih melalui pendidikan yang dilakukan secara terstruktur.

Setelah melihat bagaimana dalam pemilihan kader ataupun anggota baru yang ingin bergabung dengan Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan, hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hakim selaku Wakil II dan Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan mengenai siapa calon dari Partai Gerindra yang pantas maju pada Pilkada Bupati 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan, berikut pemaparannya:

“...Pada saat Pilkada 2020 Bupati kemarin, mengenai pemilihan Rusma Yul Anwar yang dimajukan menjadi Bupati pada saat itu, diangkat dari tingginya minat masyarakat untuk memilih Rusma Yul Anwar untuk melaju sebagai calon Bupati, setelah melihat aspirasi dari masyarakat, kami selaku seluruh kader yang berada di DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan juga sepakat untuk memajukan Rusma Yul Anwar untuk menjadi calon Bupati, setelah melalui musyawarah dan mufakat antara seluruh kader Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan...”

Melihat pemaparan yang disampaikan oleh informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan Rusma Yul Anwar yang diusung oleh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaju sebagai calon Bupati karena melihat dan mendengar aspirasi dari masyarakat yang menginginkan Rusma Yul Anwar untuk maju sebagai Bupati Pesisir Selatan pada Pilkada 2020.

Untuk mendukung pernyataan dari informan tersebut, peneliti tambahkan beberapa bukti bahwa masyarakat menginginkan dan mempercayakan Pesisir Selatan kepada Rusma Yul Anwar :

Gambar 1. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Rusma Yul Anwar



Berdasarkan bukti di atas, peneliti melihat bahwa pemilihan Rusma Yul Anwar bukan berdasar atas keinginan kader saja melainkan dari aspirasi masyarakat yang percaya kepada Rusma Yul Anwar untuk melaju menjadi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, sehingga kader dari Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan juga bersama-sama untuk mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Setelah kesisteman kelembagaan yang telah sesuai dengan AD/ART, partai yang terlembaga memiliki sistem kaderisasi dan pola rekrutmen yang jelas yang dijalankan sesuai aturan yang telah disepakati, yakni AD/ART. Untuk lebih jelas, Peneliti menanyakan pertanyaan terkait dengan bagaimana mekanisme rekrutmen anggota baru DPC Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan kepada informan Aprinal Tanjung selaku Wakil Ketua III DPC Gerindra Pesisir Selatan yang sekarang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, berikut pernyataannya:

“...untuk pelaksanaan rekrutmen anggota DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan seseorang yang ingin menjadi anggota dapat datang langsung ke kantor DPC Partai Gerindra, dan juga dapat menemui Wakil Ketua DPC bidang OKK (Organisasi Kaderisasi Keanggotaan). Setelah itu seseorang tersebut menyerahkan KTP dan menunggu Kartu Tanda Anggota (KTA) diterbitkan...”

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bagaimana proses rekrutmen anggota Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan yang bersifat terbuka untuk semua orang yang ingin bergabung menjadi anggota Partai Gerindra. Bagi masyarakat Indonesia yang mengajukan diri secara sukarela untuk menjadi anggota maupun bagian dari Partai Gerindra dimana Partai Gerindra secara terbuka

menerima setiap orang yang memiliki keinginan, keseriusan serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam AD/ART untuk menjadi bagian dari Partai Gerindra. Selama syarat tersebut bisa dipenuhi dan disanggupi oleh calon anggota maka bukti identitas sebagai anggota partai yakni Kartu Tanda Anggota (KTA) bisa dikeluarkan.

Setelah kesisteman kelembagaan dan kejelasan proses kaderisasi, partai yang sudah terlembaga yang sebagai peserta pemilu dapat menyeleksi anggota-anggotanya yang akan mengikuti kontestasi politik. Hal tersebut sangat penting karena partai harus bisa memilih orang-orang yang memiliki kualitas serta elektabilitas yang tinggi di tengah masyarakat. Maka partai yang terlembaga harus memiliki proses seleksi yang jelas dan terstruktur. Berikut disampaikan lebih lanjut oleh informan Hakimun saat peneliti ajukan pertanyaan mengenai proses seleksi kader gerindra:

“...tentu, jelas. Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan memilih dan memilah kader yang akan diusung sebagai Kepala Daerah, dengan memperhatikan popularitas dan elektabilitas calon yang akan diusung. Sebagai gambaran Partai Gerindra telah berhasil memenangkan kontestasi politik di daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 dan tahun 2020...”

Dari pernyataan informan tersebut, dapat dilihat bahwa Partai Gerindra dalam memilih dan menentukan siapa kader yang akan dipertarungkan dalam kontestasi politik harus memiliki dan mempunyai popularitas serta elektabilitas yang tinggi ditengah masyarakat dengan tujuan untuk meraih kemenangan dalam kontestasi politik tersebut.

Untuk memperkuat pernyataan informan tersebut, peneliti menambah bukti bahwa Partai Gerindra melihat calon tersebut yang akan diusung menjadi calon Kepala Daerah melalui tingkat popularitas dan tingkat elektabilitasnya, berikut buktinya:

Gambar 2. Kampanye Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah

Wow, Kampanye Rusma-Rudi di Painan Lautan Manusia

Canang News 03 Desember 2020



Wow, Kampanye Rusma-Rudi di Painan Lautan Manusia

PESISIR SELATAN, canangnews.com --Antusias serta dukungan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02, Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah pada Pilkada 9 Desember 2020, tidak bisa dibendung serta menjadi lautan manusia.

Pantauan langsung wartawan, antusias masyarakat **'Negeri Berjuluk Sejuta Pesona'** ini memadati serta menjadi lautan manusia kegiatan kampanye Paslon 02 di Painan, Kamis (3/12). Selanjutnya, masyarakat Pessel ini tumpah ruah ke jalan mengarak-arak pasangan calon bupati yang diberi jargon RA-

Berdasarkan bukti di atas, peneliti melihat bahwa Partai Gerindra memang melihat tingkat popularitas dan tingkat elektabilitas dari seorang calon Kepala Daerah, itu terlihat pada gambar di atas bagaimana banyaknya simpatisan ataupun masyarakat pendukung Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah untuk bisa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya dalam proses pemilihan atau seleksi anggota dan kader maupun calon kepala daerah ini Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kriteria yang jelas, hal tersebut bertujuan agar orang-orang yang ingin bergabung dan ingin menjadi bagian dari Partai Gerindra adalah orang-orang yang memiliki keseriusan untuk berjuang bersama Partai Gerindra. Berikut

pernyataan Ketua Bidang OKK Herpi Damson Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan terkait proses seleksi Kepala daerah maupun anggota/kader, berikut pemaparannya:

“...Tentu, di dalam pemilihan kepala daerah tentunya Partai Gerindra tidak mau gegabah dalam memilih dan menentukan pilihan kandidat untuk menjadi kepala daerah. Kriteria khusus yang dimaksud antara lain sebagai berikut, yaitu pertimbangan dari segi wilayah, pertimbangan dari segi popularitas, pertimbangan dari segi elektabilitas, pertimbangan dari segi tanggapan masyarakat, serta pertimbangan dari segi finansial. Kenapa Partai Gerindra mengusung Rusma Yul Anwar selain tingginya aspirasi masyarakat juga dikarenakan Rusma Yul Anwar itu berada dalam wilayah ibu kota kabupaten yaitu Kota Painan dengan mayoritas area sibuk dan banyak pemilih cerdas dan juga dapat merangkup wilayah utara sebagai juru kunci...”

Informan Herpi Damson secara terbuka menambahkan tentang bagaimana kriteria khusus yang harus dimiliki oleh calon atau kandidat yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Dalam wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa bacalon yang akan diusung oleh Partai Gerindra harus siap secara ekonomi dan finansial, sebab dalam masa proses kampanye untuk mempromosikan diri kepada masyarakat pasti akan membutuhkan biaya yang besar, akan tetapi bagaimana manajemen keuangan yang baik yang dilakukan oleh masing-masing tim bacalon supaya bisa memanfaatkan keuangan dengan baik.

Dalam Pilkada 2020, pemilihan Rusma Yul Anwar yang ditunjuk maju oleh Partai Gerindra sebagai Bupati dikarenakan tingginya aspirasi masyarakat Pesisir Selatan yang menginginkan Rusma Yul Anwar untuk menjadi Bupati Pesisir Selatan, sedangkan untuk pasangan atau Wakil Bupati yang dipilih adalah Rudi Hariyansyah yang merupakan kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan seorang Kepala Wilayah PT. Kimia Farma Sumatera Barat dari tahun 2009, dan ditunjuk sebagai Wakil Bupati untuk mendampingi Rusma Yul Anwar agar dapat bersaing pada saat Pilkada 2020. Alasan pemilihan tersebut dikarenakan Rudi Hariyansyah merupakan salah satu kader terbaik Partai PAN untuk daerah Pesisir Selatan dan Rusma Yul Anwar adalah seorang tokoh yang tenang dan kharismatik. Untuk mendukung argumen peneliti, peneliti tambahkan beberapa bukti tentang alasan Partai PAN memilih Rudi Hariyansyah mendampingi Rusma Yul Anwar.

Gambar 3. Alasan Partai Amanat Nasional Bergabung Dengan Partai Gerindra



Dalam hal biaya (cost) atau ongkos politik yang digunakan bacalon dalam mempromosikan dan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat, partai perlu melakukan manajemen keuangan yang baik supaya penggunaan dana lebih efisien dan tidak melewati batas. Untuk pengelolaan keuangan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan memiliki penanggung jawab yakni Bendahara dan Wakil Bendahara yang telah diakui oleh pimpinan pusat partai serta memiliki SK. Bendahara inilah yang mengawasi keluar dan masuknya keuangan Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan.

Bendahara memiliki tugas untuk mengatur semua uang masuk dan uang partai yang terjadi dalam lingkungan politik, semua permasalahan keuangan tersebut harus sepengetahuan Bendahara,

Ketua dan Sekretaris agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan keuangan partai. Untuk mengetahui bagaimana Partai Gerindra mengelola keuangan partai dengan baik peneliti mengajukan pertanyaan kepada Reni Guswadi selaku Wakil Bendahara pada saat Pilkada 2020, berikut pemaparannya:

“...Namanya partai politik tentu tidak terlepas dari cost / biaya dalam setiap pergerakan, namun demikian kami menyadari dan menyikapi sangat pentingnya manajemen keuangan untuk mengatur tata kelola keuangan yang baik. Terlepas dari ini kami di gerindra sudah melakukan segala sesuai dengan perencanaan yang matang dan melakukan pengeluaran se efisien mungkin, dan juga sudah melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dengan tetap menyisihkan pembayaran untuk tetap membuat perencanaan biaya tak terduga, biaya tamu dan biaya bencana alam...”

Seperti yang disampaikan informan di atas, dapat dijelaskan bahwa Partai Gerindra sudah melakukan pengelolaan keuangan partai dengan baik, dan terlihat bahwa Partai Gerindra sebelum menggunakan atau memakai keuangan partai harus melalui perencanaan yang matang sehingga dana atau uang yang akan dikeluarkan menjadi lebih efisien dan tidak sia-sia atau terbuang secara percuma. Dapat dikatakan bahwa Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan sudah memiliki manajemen keuangan yang baik dalam pengelolaan keuangan partai. Bentuk penggunaan atau pengelolaan keuangan partai berbentuk penggunaan dana hibah APBD yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 36 tahun 2017 tentang pedoman penggunaan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik yang mewajibkan penggunaan 50+1% untuk pendidikan politik dan pengembangan kader, serta 49% lainnya digunakan untuk operasional sekretariat yang terdiri dari penggajian pegawai, ATK, belanja tetap dan kegiatan lainnya yang bersifat kegiatan operasional partai, contohnya perjalanan dinas di dalam maupun luar provinsi yang sifatnya kegiatan partai.

Setelah melihat sebuah organisasi atau partai yang terlembaga dalam segi manajemen keuangan, selanjutnya untuk melihat sebuah partai yang sudah terlembaga sesuai dengan indikator kesisteman ini dapat dilihat dari segi kepemimpinan yang ada di DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk struktur utama kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas Ketua yakni Rusma Yul Anwar, Sekretaris Pardinal dan Bendahara Syahrudin Ujang.

Kepemimpinan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan berjalan dengan mengedepankan sinergi dan kerjasama yang dibangun antara pemimpin dengan pengurus inti partai seperti sekretaris dan bendahara dalam rangka menjalankan roda organisasi. Randall dan Svasand mengatakan bahwa sebuah partai politik yang terlembaga dengan baik adalah partai yang menerapkan prinsip demokrasi dalam setiap kegiatan mereka, dengan adanya sinergi serta kerjasama yang dibangun oleh pemimpin beserta jajaran lainnya dalam mengelola partai sedikit banyaknya telah mengindikasikan bahwa kepemimpinan dalam DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan dengan asas demokrasi yang telah diterapkan.

Dibandingkan dengan kondisi yang ada di pusat ataupun DPP Partai Gerindra dengan menggunakan sistem komando itu berbeda dengan Partai Gerindra yang berada di wilayah tingkat bawah. Partai Gerindra memang dikenal dengan partai yang bersifat komando dimana setiap pengambilan kebijakan, baik itu bersifat objektif maupun bersifat subjektif Partai Gerindra selalu menunggu keputusan dari pimpinan partai tentang kebijakan dan keputusan yang akan diambil. Tapi jika melihat Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal kepemimpinan peneliti melihat bahwa Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memenuhi asas demokrasi, karena pemimpin Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam tingkat daerah yang dipegangnya.

Sinergi dan kerjasama yang dimaksud adalah sinergi dan kerjasama yang terjadi dan terjalin antara Ketua beserta jajarannya, seperti sekretaris membidangi bagian administrasi dan pengelolaan partai, bendahara membidangi permasalahan keuangan dan pembiayaan yang timbul, Wakil Ketua I membidangi OKK (Organisasi Kepegawaian Kaderisasi), Wakil Ketua II membidangi Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu), Wakil Ketua III membidangi ekonomi, Wakil Ketua IV membidangi politik, dan Wakil Ketua V membidangi sosial. Melihat hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembagian tugas sudah sesuai dengan bidang

masing-masing, dengan hal tersebut akan berdampak kepada kinerja yang baik antar bidang sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan pertanggung jawaban laporan antar bidang kerja.

Selanjutnya peran pemimpin dapat dilihat dalam pengambilan keputusan terkait dengan Pilkada 2020 kemarin, bagaimana pemimpin mengambil keputusan untuk mencegah terjadinya penurunan integritas di antara kader ataupun anggota partai, dengan melihat bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh pemimpin Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan kepada kader-kader dari Partai Gerindra yang menguasai masing-masing daerah pilihan mereka. Dalam hal tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan yakni Herpi Damson mengenai koordinasi yang dilakukan oleh pemimpin Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dengan anggota atau kader dari Partai Gerindra, berikut pemaparannya:

“...Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat, setiap keputusan yang diambil walaupun tidak dihadiri oleh ketua namun setiap keputusan yang sifatnya wajib dan penting harus melalui ketua. Dan selama ini komunikasi kami dari dewan pimpinan cabang (DPC) ke pimpinan anak cabang (PAC) maupun ranting selalu berjalan dengan baik, dan juga model komunikasi yang kami sampaikan selalu memakai surat resmi dalam hal apapun, baik yang sifatnya sangat penting maupun tidak penting. Dan juga dalam urusan Pilkada 2020 kemarin, kami selalu mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan segala sesuatu dengan anggota PAC maupun ranting dan juga tergabung di dalam grup whatsapp...”

Berdasarkan pemaparan dari Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, dapat dilihat bahwa usaha yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk mencegah hal yang



tidak diinginkan, sesuai dengan aspek kesisteman menurut Randall dan Svasand di mana partai yang sudah terlembaga harus memiliki manajemen konflik yang baik. Dalam hal tersebut, melakukan komunikasi yang baik serta selalu mengkoordinasikan segala sesuatu keputusan yang telah diambil baik itu dari tingkat yang paling tinggi yaitu pemimpin ke bawahannya.

Untuk memperkuat pernyataan infomran tersebut, peneliti menambahkan bukti foto yang peneliti dapatkan dari arsip Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada pelaksanaan rapat kinerja yang dihadiri oleh DPC Kecamatan seluruh Pesisir Selatan dan kepala dari cabang anak ranting (DPAC), walaupun tidak semua bisa menghadiri rapat tersebut tetapi keputusan dan kebijakan yang diambil tetap disampaikan kepada pimpinan anak cabang yang tidak hadir melalui pesan grub whatsapp, berikut fotonya:

Gambar 4. Rapat Kader Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan

Dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat dikatakan bahwa Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan sudah merealisasikan indikator kesisteman organisasi yang disampaikan oleh Randall dan Svasand sesuai dengan aspek-aspek yang mencakup tentang indikator kesisteman organisasi. Sehingga aspek-aspek yang telah dicapai oleh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan telah melaksanakan sistem pelebagaan yang baik. Dengan melihat baiknya pelebagaan pada aspek kesisteman ini, peneliti melihat bahwa kekuatan politik Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan ini sudah berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri, karena dengan melihat bagaimana Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal kesisteman ini dengan melihat bagaimana partai ini dalam mekanisme pola rekrutmen kadernya, proses seleksi calon Pilkada yang akan diusung, pengelolaan manajemen keuangan yang baik, gaya kepemimpinan yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta koordinasi yang terjadi antar bidang kerja yang ada dalam Partai Gerindra yang dibagi sesuai dengan keahlian masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan politik Partai Gerindra ini sudah ditanamkan dari dasarnya yakni dari dalam tubuh partai itu sendiri.

Pelebagaan sebuah partai sangat tergantung kepada kemampuan mencapai dan mempertahankan stabilitas nilai di tengah peningkatan dan perluasan partisipasi politik. Menurut Huntington yang dikutip oleh M. Nurul Fajri mengatakan bahwa Tingkat pelebagaan sistem politik apa pun dapat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi organisasi dan prosedurnya. Demikian pula, tingkat pelebagaan organisasi atau prosedur tertentu dapat diukur dengan kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensinya. Jika kriteria ini dapat diidentifikasi dan diukur, sistem politik dapat dibandingkan dalam hal tingkat pelebagaannya. Dan juga dimungkinkan untuk mengukur kenaikan dan penurunan dalam pelebagaan organisasi dan prosedur tertentu dalam sistem politik.

2. Identitas Nilai (*Value Infusion*)

Pada aspek identitas nilai dalam melihat pelebagaan partai menurut Randall & Svasand yang menjadi perhatian atau fokusnya adalah sejauh mana platform/ideologi partai mampu tertanam dalam diri kadernya sehingga anggota secara sukarela mengidentifikasi dirinya terhadap perjuangan partai, serta sejauh mana partai mengakar di tengah masyarakat sehingga partai memiliki basis pendukung yang loyal dari kelompok populis tertentu yang ada di tengah masyarakat. Dalam aspek tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam segi penanaman nilai atau ideologi partai yang dapat menimbulkan efek loyalitas bagi pendukungnya adalah dengan melakukan proses kaderisasi yang berkelanjutan agar nilai-nilai serta ideologi kepartaian mampu diserap dengan sempurna oleh anggota kader.

Pada aspek identitas nilai dalam melihat pelebagaan partai politik menurut Randall dan Svasand, hal selanjutnya yang penting dilihat adalah *party rooting* atau sejauh mana pengakaran partai politik dimasyarakat. Dalam pengakaran partai ini yang dapat dilihat adalah sejauh mana partai tertanam kognisi masyarakat sehingga terbentuk dukungan terhadap partai. Tingkat pengakaran ini berkaitan dengan platform yang dimiliki partai, di mana dukungan masyarakat secara royal dan sukarela akan terbentuk karena orientasi politik mereka yang sesuai dengan platform partai. Sehingga pada akhirnya partai dengan tingkat pengakaran yang bagus dikarenakan platform mereka yang diminati masyarakat, akan memiliki basis dukungan tertentu dari kelompok-kelompok populis yang ada di tengah masyarakat. Pengakaran partai menjadikan partai politik memiliki basis pendukung yang spesifik di tengah masyarakat, sehingga partai dengan basis pendukung yang spesifik menandakan partai tersebut memiliki identitas yang jelas.

Dalam menjelaskan hal tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apakah Partai Gerindra memiliki hubungan dengan kelompok populis tertentu untuk meningkatkan dukungan dan menaikkan elektabilitas partai, berikut pemaparan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan Herpi Damson:

“...Namanya partai politik kita tidak hanya membangun kelompok politik dengan kelompok tertentu, pada umumnya kami selalu berteman dengan siapa saja dan selalu membaur dengan masyarakat secara masif, dengan kelompok tani, kelompok nelayan, pemuda, pemudi, tokoh masyarakat, ninik mamak, dan lain sebagainya... yang terpenting Partai Gerindra Kabupaten

Pesisir selatan tidak pernah membagi atau mengelompokkan dengan siapa bergaul, sebab partai gerindra adalah partai yang berjuang terhadap kesejahteraan rakyat....”

Dalam pemaparan informan di atas dapat dijelaskan bahwa Partai Gerindra selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin mengikatkan diri dengan Partai Gerindra, tidak peduli siapa dan apa latar belakang orang ataupun kelompok atau organisasi yang ingin bergabung dan ingin berjuang bersama Partai Gerindra untuk selalu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut membuat Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan memiliki dukungan yang diperoleh dari masyarakat sehingga meningkatkan elektabilitas partai.

Untuk memperkuat pernyataan di atas, peneliti menambahkan bukti berupa perolehan suara yang didapatkan oleh Partai Gerindra baik itu dari Pilkada tahun 2010, 2015 dan 2020 serta data perolehan suara Pileg 2009, 2014, dan 2019, berikut datanya:

Terlepas dari hubungan antara partai dengan kelompok populis yang ada di masyarakat, peneliti melihat bahwa proses penetrasi yang dilakukan oleh kader Partai Gerindra di tengah masyarakat pada saat Pilkada Tahun 2020 tidak luput dari unsur ketokohan Prabowo Subianto yang memang memiliki pamor di Sumatera Barat tak terkecuali di Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga dengan memanfaatkan unsur serta simbol ketokohan Prabowo Subianto membuat Partai Gerindra lebih mudah diterima oleh masyarakat. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, peneliti menambahkan bukti berupa foto baliho dan hasil suara yang diperoleh oleh Prabowo Subianto pada saat Pilpres 2019:

Gambar 5. Foto Pemasangan Baliho Prabowo Subianto Oleh Kader Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan



Hal tersebut secara tidak langsung memberikan keuntungan lebih kepada calon Kepala Daerah yang berasal dari Partai Gerindra dengan memanfaatkan eksistensi ketokohan Prabowo Subianto sehingga mempermudah calon tersebut untuk menarik minat dan dukungan masyarakat. Pernyataan peneliti sejalan dengan yang disampaikan informan Aprinal Tanjung, berikut pemaparannya:

“...memang betul, efek positif yang dihasilkan oleh ketokohan Prabowo Subianto memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mendongkrak dukungan serta popularitas Partai Gerindra, itu tidak terjadi hanya di Kabupaten Pesisir Selatan saja, tetapi diseluruh penjuru daerah di Provinsi Sumatera Barat. Jadi secara tidak langsung Partai Gerindra ini sudah memiliki tempat dihati masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan...”

Dari paparan yang disampaikan oleh informan di atas, dapat dijelaskan bahwa efek yang dihasilkan dari adanya ketokohan Prabowo Subianto memiliki peran yang cukup penting untuk mendongkrak dukungan serta popularitas partai di tengah masyarakat, sehingga nama Partai Gerindra semakin mudah untuk dikenal dan diingat masyarakat. Maka tidak heran pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 kemarin sering kita jumpai atribut kampanye Pilkada Partai Gerindra yang menempatkan foto Prabowo Subianto.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, peneliti melihat dalam aspek identitas nilai, pertama Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan memang memiliki hubungan dengan beberapa kelompok populis tertentu yang berada dan terbentuk di tengah masyarakat dan juga karena adanya efek ketokohan Prabowo Subianto, sehingga dukungan dan popularitas serta elektabilitas Partai

Gerindra meningkat di Kabupaten Pesisir Selatan. Menurut aspek identitas nilai yang disampaikan oleh Randall dan Svasand, Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan sudah melaksanakan pelebagaan yang baik dalam aspek identitas nilai di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam kaitan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan, dalam indikator identitas nilai ini peneliti melihat bahwa Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dalam membangun hubungan dengan kelompok luar tidak memandang latar belakang dari kelompok yang ingin bergabung dengan Partai Gerindra, Partai Gerindra selalu menerima dengan tangan terbuka bagi siapa saja dan kelompok apa saja yang ingin bergabung, hal tersebut membuat dukungan yang dimiliki oleh Partai Gerindra meningkat atas dukungan yang diberikan oleh kelompok yang bergabung dengan partai tersebut.

Menurut Huntington yang dikutip oleh Firdaus kemampuan pelebagaan partai sangat bergantung kepada adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Adaptability secara konseptual menyangkut kapasitas partai menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pelebagaan dari sudut complexity mengacu pada penganekaragaman organ untuk memaksimalkan fungsi-fungsi partai dalam mengelola beragam nilai dan kepentingan dari berbagai segmen masyarakat sebagai basis sosial partai. Coherence sebagai salah satu takaran pelebagaan partai menitik beratkan pada keterpaduan dan kesolidaritasan yang menunjukkan adaptabilitas atas kompleksitas fungsi organ dalam satu metode organisasi dalam mengelola beragam segmen sosial. Sisi pelebagaan dari sudut pandang autonomy menampilkan sisi kemandirian partai dalam menentukan sikap politik tanpa tekanan dan pengaruh dari lingkungan eksternal. Sisi lain pelebagaan partai dari tinjauan otonomi juga merepresentasikan kebebasan untuk menentukan dan mengekspresikan sikap politik sebagai manifestasi nilai-nilai perjuangan partai sekaligus menjadi identitas pembeda dengan lain.

3. Otonomi Kebijakan (*Decisional Autonomy*)

Aspek selanjutnya dalam melihat pelebagaan partai politik yaitu terletak pada aspek otonomi kebijakan/pengambilan keputusan, yang menjadi perhatian utama dalam aspek ini adalah bagaimana hubungan partai dengan aktor yang berada di luar partai, baik itu otoritas penguasa, sumber dana (pengusaha) maupun sumber dukungan massa. Kemudian apakah hubungan tersebut bersifat ketergantungan atau bersifat independen, dan kemudian apakah hubungan ini mempengaruhi perumusan kebijakan dalam partai atau tidak.

Jika melihat bagaimana Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dengan pihak luar, Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan senantiasa menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu Partai Gerindra juga menjalin hubungan dengan beberapa tokoh pengusaha serta penguasa ataupun tokoh masyarakat. Hubungan yang terjalin antara Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dengan pengusaha ataupun perusahaan dapat berupa kerjasama dalam rangka pemberian dana bantuan apabila terjadi bencana alam. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Herpi Damson selaku Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan mengenai hubungan Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dengan aktor di luar partai, berikut pemaparannya:

“...Selama ini partai Gerindra selalu menjalin hubungan yang harmonis antara penguasa, pengusaha dan kelompok masyarakat tertentu dan juga Gerindra salah partai yang tidak ingin melawan atau mencari lawan terhadap penguasa maupun unsur lainnya. Dan juga kami selalu menjalani hubungan baik sampai saat sekarang ini...”

Melihat pada penjelasan yang disampaikan oleh informan di atas, terkait dengan aktor luar yang menjalin hubungan dengan Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari para penguasa, pengusaha, dan kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Aktor luar tersebut dapat berupa organisasi masyarakat seperti organisasi kepemudaan, majelis ta'lim, pengusaha bakso, bos sawit, dan ritel. Keberadaan aktor luar memiliki pengaruh yang baik terhadap elektabilitas maupun popularitas dalam mencari dukungan, dengan melakukan pola pendekatan secara personal itu akan sangat menguntungkan bagi calon yang berasal dari Partai Gerindra serta secara tidak langsung akan meningkatkan dukungan yang diberikan terhadap Partai Gerindra itu sendiri.

Untuk memperkuat pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas, peneliti menambah beberapa bukti foto bagaimana Partai Gerindra menjalin hubungan dengan pihak luar tersebut, berikut fotonya:

Gambar 6. Jalinan Silaturahmi Partai Gerindra Dengan Organisasi Masyarakat



Dalam pelebagaan partai politik yang disampaikan oleh Randall dan Svasand dengan adanya hubungan yang terjalin dengan baik antara partai dengan aktor luar partai, maka penting untuk melihat bagaimana pola hubungan yang terjadi antara partai dengan aktor luar tersebut. Apakah keputusan-keputusan yang diambil partai ditentukan oleh aktor tersebut atau partai mampu bergerak secara independen dan tidak terikat terhadap hubungan serta dukungan yang telah diberikan oleh aktor-aktor yang sudah terjalin tersebut.

Untuk melihat lebih jauh mengenai hal tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan terkait apakah hubungan yang terjalin antara partai politik dengan pihak luar mempengaruhi ataupun menentukan keputusan yang akan diambil oleh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan, berikut penjelasan informan Aprinal Tanjung selaku Wakil Ketua III DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan:

“...Partai gerindra selalu mengambil forum tertinggi musyawarah dan mufakat sesama anggota dan kader partai gerindra Dan juga partai gerindra kabupaten pesisir selatan, setiap pengambilan keputusan selalu mengutamakan musyawarah. Keputusan tertinggi dipegang oleh ketua partai tingkat pusat, artinya setiap keputusan dari DPP adalah keputusan mutlak yang tidak bisa ditawar dan diganggu gugat. Kalau masalah keikutsertaan aktor luar dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Partai Gerindra itu tidak akan terjadi, tetapi hubungan yang terjalin antara Partai Gerindra dengan pihak luar tersebut membuat Partai Gerindra bukan tidak mungkin akan mengambil keputusan untuk kesejahteraan bersama...”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua III DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjalin dengan baik antara Partai Gerindra dengan pihak luar atau aktor di luar partai tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan ataupun kebijakan yang akan dibuat oleh Partai Gerindra. Menurut informan tersebut, keputusan tertinggi tetap dipegang oleh DPP yang tidak bisa ditawar ataupun diganggu gugat.

Dukungan yang diperoleh dari kelompok di luar partai yang ada di masyarakat menjadi sebuah perhatian bagi Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana Partai Gerindra benar-benar memperjuangkan aspirasi dari kelompok tersebut, dan jika itu tidak terlaksanakan maka akan terjadi perpecahan hubungan antara partai politik dengan kelompok tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, Partai Gerindra harus bisa mengambil keputusan ataupun membuat kebijakan yang tidak merugikan ataupun tidak menguntungkan pihak luar tersebut, tetapi keputusan dan kebijakan yang diambil harus berlandaskan kesejahteraan bersama.

Untuk memperkuat argumen di atas mengenai memperjuangkan aspirasi dari suatu kelompok masyarakat tersebut, peneliti menambahkan bukti foto yang diambil dari arsip Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan tentang pemberian bantuan keolahragaan kepada kelompok pemuda, berikut fotonya:

Gambar 7. Bantuan Keolahragaan Untuk Kelompok Pemuda



Dalam menjelaskan mengenai pengambilan kebijakan atau keputusan, peneliti menanyakan hal tersebut kepada Pardinal selaku Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan, berikut penjelasannya:

“...Dapat kami jelaskan setiap pengambilan keputusan tergantung tingkatan dan kegunaannya, jika keputusan yang bersifat daerah kabupaten pesisir selatan yang tidak bersifat tetap dan urgen akan langsung diputuskan oleh ketua dan pengurus lainnya dan jika dalam hal pengambilan keputusan tentang arah dan kebijakan partai akan dilakukan musyawarah ketingkat yang lebih tinggi seperti DPD dan DPP Gerindra. Pada intinya kami dewan pimpinan cabang kabupaten pesisir selatan tentang arah dan kebijakan partai didaerah tergantung kebijakan ketua umum dan ketua partai tergantung tingkatan...”

Dalam penjelasan informan di atas, dapat dilihat bahwa Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan harus berdasarkan kegunaan serta tingkat kepentingan. Tetapi jika keputusan atau kebijakan tersebut memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi harus melakukan musyawarah ke tingkat yang lebih tinggi yakni DPP atau DPD Gerindra agar keputusan dan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak melenceng dari visi dan misi partai.

Untuk memperkuat pernyataan informan di atas, berikut peneliti tambahkan beberapa bukti berupa penolakan yang dilakukan oleh fraksi Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan yang rasanya mampu memperkuat argumen mengenai bagaimana Partai Gerindra mengambil keputusan dan kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi Partai Gerindra yakni berlandaskan kesejahteraan masyarakat. Bukti tersebut berupa penolakan terhadap anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan lembaga.

Gambar 8. Bantuan Sosial Berupa Sembako Partai Gerindra Pesisir Selatan Saat Bencana Alam



Berdasarkan bukti di atas, peneliti melihat bahwa Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di daerah setingkat DPC sudah melaksanakan aspek otonomi kebijakan sesuai dengan visi dan misi partai yang berlandaskan kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya menjadi poin positif bagi Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dalam membangun citra positif dan mengambil hati masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Setelah melihat dan melakukan wawancara dengan informan, dapat dilihat bahwa Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan aspek otonomi kebijakan ini, Partai Gerindra

Kabupaten Pesisir Selatan menjalin hubungan dengan aktor luar seperti pengusaha, perusahaan, organisasi kemasyarakatan dan juga kelompok-kelompok profesi seperti pedagang, nelayan dan kelompok lainnya. Hubungan yang terjadi dengan aktor luar dikatakan tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan ataupun pembuatan kebijakan yang terjadi dalam internal partai, tetapi dukungan yang diberikan oleh kelompok masyarakat menjadi perhatian bagi partai dengan benar-benar memenuhi janji yang telah diberikan serta mendengarkan aspirasi mereka. Jika dilihat dalam peningkatan kekuatan politik yang dimiliki oleh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan, dalam aspek ini Partai Gerindra sudah dapat membuktikan bahwa tidak satupun dari aktor luar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dibuat oleh partai, tetapi arah kebijakan ataupun keputusan yang diambil mengarah kepada kepentingan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kekuatan politik secara internal sudah terbangun di dalam tubuh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan sehingga membuat partai ini kokoh dan memudahkan untuk mencari dan meningkatkan kekuatan di luar partai.

Menurut Firdaus, secara normatif, fungsi mendasar berdirinya suatu partai politik dimaksudkan untuk melembagakan nilai tertentu secara tertib dan stabil mulai dari tingkat masyarakat sipil (*civil society*) hingga pada level negara. Struktur organisasi partai ditata sedemikian rupa untuk mengemban fungsi-fungsi tersebut, terutama dalam usaha memobilisasi dukungan melalui diseminasi nilai dan kepentingan yang akan diperjuangkan dalam program-program kebijakan partai. Secara lebih spesifik dan terkelompok fungsi-fungsi partai politik tersebut menurut Miriam Budiardjo adalah sebagai sarana:

- i) Komunikasi politik
- ii) Sosialisasi politik
- iii) Rekrutmen politik
- iv) Pengatur konflik

4. Reifikasi (*Reification*)

Aspek terakhir dalam melihat sebuah organisasi yang terlembaga menurut Randall & Svasand adalah reifikasi. Pada aspek ini fokusnya adalah bagaimana partai politik memberikan citra positif terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat akan memberikan dukungan serta loyalitas terhadap partai politik tersebut. Reifikasi juga merujuk pada apakah sebuah partai telah tertanam dalam imajinasi publik, sehingga dalam aspek reifikasi ini banyak berhubungan dengan politik simbol yang dimainkan partai, platform partai yang populis serta bagaimana penerapannya. DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan senantiasa hadir di tengah masyarakat menjelmakan dirinya sebagai organisasi yang memiliki nilai positif dan dekat dengan masyarakat. Dalam menempatkan diri dan memberikan citra positif di tengah masyarakat, Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan salah satu fungsi partai politik yaitu sebagai sarana pendidikan politik. Pernyataan ini seperti yang disampaikan informan Hakim berikut ini:

“...tentunya kami dari Partai Gerindra melakukan sosialisasi dan menjual kepada masyarakat tentang Partai Gerindra dan figur dari Partai Gerindra itu sendiri. Selain itu kami juga melakukan pendidikan politik untuk masyarakat dengan tujuan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai politik. Dan juga kami selaku kader dari Partai Gerindra selalu memberikan bukti bahwa Partai Gerindra adalah partai yang selalu memperjuangkan masyarakat dengan program-program yang berpihak kepada masyarakat...”

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan juga melaksanakan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik dengan target utama masyarakat, peneliti melihat ini sebagai terobosan yang sangat dilakukan oleh partai politik untuk membangun citra positif di tengah masyarakat. Dengan hal tersebut terbukti bahwa partai bukan hanya aktif melakukan kegiatan ketika pelaksanaan pemilihan saja, tetapi terlepas dari hal tersebut partai tetap harus menjalankan programnya secara konsisten.

Sebagai partai pemenang dalam Pilkada 2020 Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk terus konsisten terhadap manifesto perjuangan partai.

Hal tersebut demi mempertahankan eksistensi partai dimasa depan dengan menjaga kepercayaan masyarakat. Maka dari itu melalui kadernya yang duduk di legislatif harus tetap konsisten dalam memperjuangkan konstituenya serta memenuhi janji-janji yang mereka berikan. Kemudian menurut informan Harianto menambahkan, dalam rangka menjaga eksistensi serta elektabilitas partai serta menepati janji-janji kepada masyarakat, DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan senantiasa melakukan aksi-aksi nyata di tengah masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Berikut pemaparan informan:

“...kita selaku kader yang berasal dari Partai Gerindra yang berlabel sebagai partai pemenang di Kabupaten Pesisir Selatan harus bisa mempertahankan hal tersebut dan berusaha untuk selalu menjadi nomor satu di Kabupaten Pesisir Selatan dan dihati masyarakat Pesisir Selatan, dengan melakukan aksi apakah itu sifatnya sosial seperti membantu masyarakat saat terjadi bencana, disamping itu juga banyak bentuk kegiatan yang dilakukan Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendekatkan diri di tengah masyarakat...”

Untuk memperkuat pernyataan informan di atas, berikut peneliti lampirkan beberapa kegiatan Partai Gerindra dalam rangka mendekatkan diri di tengah masyarakat serta memberikan citra positif untuk masyarakat, foto-foto berikut ini dilampirkan sebagai data sekunder untuk memperkuat penjelesaian peneliti:

Gambar 9. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Partai Gerindra



Foto di atas menampilkan beberapa dokumentasi kegiatan Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dalam merangka menghadirkan diri di tengah masyarakat termasuk juga dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Foto tersebut menjelaskan Partai Gerindra melalui kadernya yang duduk dikursi legislatif juga turut andil dalam membantu masyarakat yang terkena musibah dan bantuan kepada pemuda berupa kostum olahraga.

Setelah melihat bagaimana partai dalam menampilkan diri sebagai organisasi yang positif di tengah masyarakat, dalam aspek reifikasi menurut Randall dan Svasand juga berkaitan dengan politik simbol yang dimainkan partai, platform partai yang populis serta implementasi platform yang masif. Dalam hal politik simbol tersebut, peneliti telah sampaikan pada bagian sebelumnya bahwa Partai Gerindra terkenal dengan platform partai yang pro kepada masyarakat menengah ke bawah seperti petani, nelayan dan pedagang. Hal tersebut terbukti pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan Partai Gerindra keluar sebagai pemenang. Dalam kaitannya dengan kekuatan politik yang dimiliki oleh Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat bahwa setelah mendapatkan dukungan dan memenangkan Pilkada 2020, peneliti menyimpulkan bahwa memang Partai Gerindra sudah mendapatkan kepercayaan dan sudah berhasil menjadikan partai ini menjadi partai yang memiliki citra yang positif di tengah masyarakat sehingga dukungan yang diberikan oleh masyarakat Pesisir Selatan dapat dimaksimalkan sebaik mungkin.

Setelah melaksanakan wawancara dengan beberapa informan, selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan triangulasi dengan tujuan memvalidasi data yang peneliti peroleh dilapangan, untuk hal tersebut peneliti mewawancarai informan triangulasi yaitu Hardi Darma Putra selaku kepala Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan, berikut pemaparan beliau:

“...dalam pandangan sebagai Kepala Kesbangpol di Pesisir Selatan ini, melihat bahwa Partai Gerindra dalam segi aspek yang disampaikan tadi, Partai Gerindra ini sudah dapat dikatakan

baik dalam segi pelebagaannya untuk meningkatkan kekuatan politiknya di Kabupaten Pesisir Selatan ini, buktinya kan dapat dilihat kalau partai ini sudah memenangkan pemerintahan secara eksekutif di Pesisir Selatan ini dengan mengantarkan kadernya menjadi Bupati, dan bagaimana juga partai ini melaksanakan kegiatan sosial dan melaksanakan berbagai kegiatan lainnya untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat...”

Setelah melihat dan membaca pernyataan yang disampaikan oleh informan triangulasi yakni Hardi Darma Putra, beliau menjelaskan bahwa secara pelebagaan Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan dalam segala aspek yang disampaikan oleh Vicky Randall & Lard Svasand sudah dapat dikatakan baik, karena menurut beliau Partai Gerindra sudah menjalankan fungsi dan tugas partai sebagaimana mestinya yang harus dilakukan. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan triangulasi kedua dalam penelitian ini, yakni Darwiadi yang merupakan salah satu kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan koalisi dari Partai Gerindra dalam Pilkada Bupati 2020 Kabupaten Pesisir Selatan, beliau memaparkan sebagai berikut:

“...memang betul yang disampaikan oleh Hardi Kepala Kesbangpol tersebut, sebagai sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) pada saat Pilkada 2020 tersebut melihat bahwa Partai Gerindra sudah sesuai dengan aspek pelebagaan yang disampaikan tadi, dan dalam hal peningkatan kekuatan politik yang dimiliki oleh Partai Gerindra ini, melihat bahwa kader yang dimiliki oleh Partai Gerindra sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan apa yang ditetapkan sehingga kekuatan yang mereka miliki dapat dikatakan meningkat apalagi partai tersebut juga tergolong partai baru dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini...”

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh informan triangulasi dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa kekuatan politik yang dimiliki oleh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan jika dilihat dalam segi pelebagaannya baik itu dari dalam maupun dari luar partai itu sendiri. Sebuah partai dapat dikatakan sebagai partai yang memiliki pelebagaan yang baik seharusnya bisa melaksanakan fungsinya sebagai partai sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Vicky Randall & Lard Svasand bahwa partai yang terlembaga dengan baik harus bisa melaksanakan keempat indikator pelebagaan yakni Kesisteman Organisasi, Identitas Nilai, Otonomi Kebijakan dan reifikasi. Ketika sebuah partai sudah melaksanakan keempat indikator itu dengan baik maka dapat dikatakan bahwa partai tersebut sudah terlembaga dengan baik, dan terhadap peningkatan kekuatan politik yang dimiliki, jika sebuah partai sudah mempunyai pondasi kekuatan dari dalam, maka akan dengan mudah partai tersebut untuk memperluas dan meningkatkan kekuatan yang dimilikinya, baik itu dari dalam maupun dari luar partai. Seperti pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Pesisir Selatan, dimana Partai Gerindra yang mengusung salah seorang kader terbaiknya yakni Rusma Yul Anwar yang memiliki latar belakang sebagai seorang tenaga pendidik yang disandingkan oleh Rudy Hariyansyah yang memiliki latar belakang sebagai kepala apoteker Provinsi Sumatera Barat yang berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Basedau dan Stroh, menurutnya pengakaran partai di masyarakat menunjuk pada sejauhmana partai politik independen dari individu dari dalam dan dari luar partai. Dimensi organisasi menunjuk pada sejauhmana apparatus organisasi partai hadir konsisten disemua level administrasi dan bertindak dalam kerangka kepentingan partai. Dan koherensi menunjuk pada sejauhmana perilaku partai sebagai sebuah kesatuan organisasi dan sejauhmana tingkat tertentu toleransi partai atas perselisihan dalam partai.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti sampaikan pada pembahasan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dapat dikatakan terlembaga dengan baik berdasarkan pada keempat aspek pelebagaan menurut Vicky Randall dan Lars Svasand. Dengan baiknya pelebagaan yang dimiliki oleh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan membuat partai tersebut dapat memenangkan pasangan calon yang diusung pada saat Pilkada Bupati 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan walaupun calon yang mereka usung memiliki jejak kasus hukum.

Dari keempat aspek pelebagaan yang disampaikan oleh Vicky Randall dan Lard Svasand di atas maka peneliti juga menyimpulkan bahwa tingkat pelebagaan yang dimiliki oleh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan menjadi faktor utama Partai Gerindra dalam memenangkan Pilkada tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan. Pelebagaan yang baik yang dimiliki oleh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan membuat partai ini lebih mudah untuk membangun kepercayaan serta mengambil hati masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sehingga bisa meraih dukungan dan memenangkan Pilkada 2020 Kabupaten Pesisir Selatan walaupun calon yang diusung partai ini memiliki jejak kasus hukum. Dengan memiliki tingkat pelebagaan yang baik, secara tidak langsung Partai Gerindra juga membangun kekuatan politiknya di Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan indikator pelebagaan yang disampaikan oleh Vicky Randall dan Lard Svasand tersebut, karena pelebagaan yang disampaikan tersebut dapat meningkatkan kekuatan politik yang dimiliki oleh sebuah partai politik.

Berdasarkan semua aspek pelebagaan partai yang telah dijelaskan, peneliti menyimpulkan bahwa dibalik kemenangan yang diraih oleh Partai Gerindra dalam Pilkada Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat pelebagaan politik yang baik serta efek ketokohan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto yang memiliki jabatan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Ketokohan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto menimbulkan efek positif untuk caleg atau kader dari Partai Gerindra yang dimana dapat meningkatkan elektabilitas dari caleg atau kader dari Partai Gerindra tersebut. Lebih lanjut Partai Gerindra juga meningkatkan pelebagaan partainya sehingga membuat elektabilitas Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih tinggi dan hasil yang diperoleh dari hal tersebut adalah kemenangan dalam Pilkada Bupati pada tahun 2020.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Audrah Yessy. 2014. Pelebagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulawesi Selatan Periode 2013-2018, *Skripsi* tidak dipublikasikan, FISIP Universitas Hasanuddin.
- Brando, Biwa Okta. 2017. Dominasi Politik Partai Golkar di Kota Solok Periode 1999-2014, *Skripsi* tidak dipublikasikan, FISIP Universitas Andalas.
- Budiarjo, Miriam. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Fajri, M Nurul. Penguatan Pelebagaan Partai Politik Melalui Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik, PUSaKO (Peneliti Pusat Studi Konstitusi) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas.
- Firdaus, 2015. *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, Yrama Widya: Bandung.
- Juny Saputri, Wessy. 2021. Pelebagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Padang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. *Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Andalas, Padang.
- Kompas.com, Lihat (<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/04/15553951/profil-partai-gerindra-sejarah-tokoh-dan-kisah-kepala-garuda>) diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Nasir, Nurlatipah. 2016. Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelebagaan Partai Politik DI Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen. Dalam *Jurnal Politik Profetik* Vol 04 No 1.
- Okadarmi Dwi Kaypama, Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014, FISIP Universitas Andalas, 2019.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Ridha T.R, Muhammad. 2016. Dilema Pelebagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov Volume 2 No. 1*.
- Rmol.id, Lihat (<https://rmol.id/read/2014/05/17/155529/mengapa-prabowo-merasa-mewarisi-semangat-dan-cita-cita-bung-karno>) diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Sitepu, P. Anthonius Transformasi Kekuatan-Kekuatan Politik Suatu Studi Teori Kelompok dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*.
- Sugiyono. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Yin, Robert. K. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.